



Diplomasi Sub-Regional: Peran Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dalam Membangun Konektivitas dan Pertumbuhan di Asia Tenggara

Sub-Regional Diplomacy: The Role of the Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) in Building Connectivity and Growth in Southeast Asia

Kheysa Husan Khasifa Romadhoni¹, Hilda Fitriyanti², Ivana Joya Mahadina³, Elly Nurlia⁴

E-mail Korespondensi : 6670230066@untirta.ac.id

Sultan Ageng Tirtayasa University, Banten, Indonesia

Info Article

| **Submitted:** 27 October 2025 | **Revised:** 12 December 2025 | **Accepted:** 6 December 2025

| **Published:** 6 December 2025

How to cite: Kheysa Husan Khasifa Romadhoni, etc., "Diplomasi Sub-Regional: Peran Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dalam Membangun Konektivitas dan Pertumbuhan di Asia Tenggara", *Sociale : Journal of Social and Political Sciences*, Vol. 1 No. 2, 2025, p. 155-170.

ABSTRACT

The Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), established in 1993, is a sub-regional cooperation framework to strengthen connectivity and economic integration in Southeast Asia. This study analyzes the role of IMT-GT as a form of development diplomacy using descriptive qualitative methods through a literature review sourced from academic journals, ADB reports, and government publications. The findings show that the IMT-GT has undergone a significant shift from infrastructure-based cooperation to multidimensional collaboration emphasizing digital connectivity, green economy, and local empowerment. More specifically, Indonesia prioritizes inclusive development in Sumatra, Malaysia consolidates itself as a regional halal industry and logistics hub, while Thailand integrates the IMT-GT into its digital and green transformation agenda. Key challenges include infrastructure gaps, cross-border policy coordination, and funding constraints. Overall, the IMT-GT has demonstrated measurable achievements in strengthening sub-regional integration and the effectiveness of development diplomacy, although greater policy coherence is still needed to ensure the sustainability of the program.

Keyword: Development Diplomacy, IMT-GT, Regional Connectivity, Sustainable Growth.

ABSTRAK

Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), yang dibentuk pada 1993, merupakan kerangka kerja sama sub-regional untuk memperkuat konektivitas dan integrasi ekonomi di Asia Tenggara. Penelitian ini menganalisis peran IMT-GT sebagai bentuk diplomasi pembangunan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur yang bersumber dari jurnal akademik, laporan ADB, dan publikasi pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa IMT-GT mengalami pergeseran signifikan dari kerja sama berbasis infrastruktur menuju kolaborasi multidimensi yang menekankan konektivitas digital, ekonomi hijau, dan pemberdayaan lokal. Secara lebih spesifik, Indonesia memprioritaskan pembangunan inklusif di Sumatra, Malaysia mengonsolidasikan diri sebagai pusat industri halal dan logistik regional, sedangkan Thailand mengintegrasikan IMT-GT ke dalam agenda transformasi digital dan hijau. Tantangan utama meliputi ketimpangan infrastruktur, koordinasi kebijakan lintas negara, serta keterbatasan pembiayaan. Secara keseluruhan, IMT-GT menunjukkan capaian terukur dalam memperkuat integrasi sub-regional dan efektivitas diplomasi pembangunan, meskipun penguatan koherensi kebijakan tetap diperlukan untuk menjamin keberlanjutan program.

Kata Kunci: Diplomasi Pembangunan, IMT-GT, Konektivitas Regional, Pertumbuhan Berkelanjutan

Pendahuluan

Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah dengan dinamika ekonomi paling kompleks dan menarik di dunia. Di tengah pesatnya integrasi ekonomi melalui ASEAN, muncul bentuk kerja sama sub-regional yang lebih spesifik dan berbasis kewilayahan, salah satunya adalah Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT). Inisiatif ini dibentuk pada tahun 1993 dengan dukungan Asian Development Bank (ADB) sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan dan memperkuat integrasi ekonomi antarwilayah yang memiliki kesamaan geografis, sosial, dan ekonomi (Effendi et al., 2024). Konsep growth triangle lahir dari ide open regionalism, yaitu kerja sama ekonomi lintas batas yang tidak hanya didorong oleh pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dan sektor swasta sebagai motor penggerak utama (Rakhmadi et al., 2025). Dalam kerangka ini, IMT-GT menjadi contoh penting bagaimana diplomasi pembangunan tidak hanya dilakukan pada tingkat antarnegara (*state-to-state diplomacy*), tetapi juga melalui subnational diplomacy yang menghubungkan provinsi-provinsi di Sumatra, Semenanjung Malaysia, dan Thailand Selatan. Dengan demikian, IMT-GT dapat dipahami sebagai instrumen diplomasi pembangunan yang menggabungkan logika ekonomi dan politik dalam satu kerangka kolaborasi (Usman et al., 2024).

Sejak awal pembentukannya, IMT-GT bertujuan untuk memperkuat integrasi ekonomi melalui tiga dimensi utama, yakni peningkatan konektivitas fisik, pengembangan ekonomi lokal, dan penguatan kapasitas kelembagaan daerah. Melalui tiga pilar ini, kerja sama IMT-GT diharapkan dapat memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah dan menciptakan pertumbuhan yang inklusif (Putri, 2025). Di Indonesia, provinsi-provinsi di wilayah Sumatra seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Riau menjadi bagian penting dari program ini karena posisinya yang strategis sebagai jembatan perdagangan dan investasi menuju Malaysia serta Thailand (Srifauzi & Fazrina, 2023). Memasuki dekade ketiga pelaksanaannya, IMT-GT mengalami perubahan paradigma signifikan. Jika pada awalnya fokus kerja sama bertumpu pada pembangunan infrastruktur dasar seperti pelabuhan, jalan lintas, dan kawasan industri, maka sejak 2016, arah kebijakan IMT-GT bergeser ke agenda pembangunan berkelanjutan, konektivitas digital, ekonomi hijau, serta penguatan daya saing lokal (Tangtrongjita, 2023). Transformasi ini sejalan dengan IMT-GT Vision 2036 yang menargetkan kawasan ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sub-regional yang inklusif, hijau, dan terhubung.

Dalam penelitian ini, kerangka teori diplomasi pembangunan (*development diplomacy*) digunakan sebagai pendekatan utama untuk memahami dinamika evolusi IMT-GT. Diplomasi pembangunan merupakan pendekatan modern dalam hubungan internasional yang menggabungkan dimensi politik luar negeri dengan

strategi pembangunan ekonomi (Pahlawan, 2025). Diplomasi jenis ini tidak lagi dipahami sebagai instrumen yang semata-mata berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan politik, tetapi juga sebagai sarana memperluas kerja sama ekonomi, memperkuat posisi strategis negara di kawasan, dan mendukung pencapaian sustainable development goals (Rokhaniyah & Almeida, 2023). Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand, diplomasi pembangunan menjadi mekanisme penting untuk menegosiasikan kepentingan ekonomi, menarik investasi, dan memperkuat daya saing regional melalui kolaborasi lintas batas. Dalam konteks ini, diplomasi pembangunan berfungsi sebagai bentuk soft power yang menekankan daya tarik, kolaborasi, dan solidaritas, bukan dominasi kekuatan militer atau politik (Candra et al., 2024).

Di Asia Tenggara, diplomasi pembangunan melalui kerja sama sub-regional seperti IMT-GT memperlihatkan penerapan konkret teori development diplomacy, karena melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta secara simultan dalam satu jaringan kerja sama lintas batas (Yolin & Rantepadang, 2024). Model ini memungkinkan pendekatan bottom-up diplomacy, di mana pemerintah daerah, komunitas lokal, dan pelaku bisnis menjadi aktor non-negara yang terlibat langsung dalam perumusan dan implementasi agenda pembangunan. Melalui proyek konektivitas fisik dan digital, pengembangan pariwisata halal, serta kolaborasi pendidikan lintas negara, IMT-GT mencerminkan praktik diplomasi pembangunan yang bersifat multidimensi (Anantakupa, 2025; Rizqiany & Maria, 2021). Lebih jauh, IMT-GT memperlihatkan bagaimana kerja sama ekonomi dapat menjadi instrumen penciptaan stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan yang sebelumnya tertinggal.

Namun demikian, diplomasi pembangunan dalam IMT-GT juga menghadapi tantangan struktural. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan akan keselarasan antara kebijakan nasional dan agenda kerja sama regional. Hal ini menjadi penting karena ketiga negara memiliki prioritas pembangunan dan kebijakan investasi yang berbeda (Viphindartin & Bawono, 2023). Efektivitas diplomasi pembangunan IMT-GT sangat bergantung pada kemampuan negara anggota dalam membangun policy coherence dan memastikan bahwa setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tingkat lokal maupun nasional. Teori diplomasi pembangunan dalam konteks ini menyediakan kerangka konseptual komprehensif untuk memahami bagaimana IMT-GT berfungsi bukan hanya sebagai forum ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme diplomasi yang memperkuat konektivitas, memperluas pertumbuhan daerah, dan meningkatkan ketahanan ekonomi kawasan (Farid et al., 2025).

Dalam praktiknya, diplomasi pembangunan di IMT-GT terimplementasi melalui tiga bentuk utama: diplomasi ekonomi yang menitikberatkan pada

perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur; diplomasi sosial-budaya melalui pengembangan pariwisata halal, pertukaran akademik, dan kerja sama budaya; serta diplomasi kelembagaan yang memperkuat jejaring antara pemerintah daerah, universitas, dan sektor swasta ((Permana & Millinia, 2025; Tamrin et al., 2024). Ketiga bentuk diplomasi tersebut menunjukkan bahwa IMT-GT bukan sekadar forum ekonomi, tetapi wadah penerapan diplomasi pembangunan yang sinergis antara aktor negara dan non-negara dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Jika dibandingkan dengan kerja sama ASEAN secara umum, IMT-GT memiliki karakter yang lebih bottom-up. ASEAN cenderung berfokus pada isu makro seperti integrasi pasar dan harmonisasi kebijakan regional, sementara IMT-GT menekankan pendekatan pembangunan berbasis kebutuhan komunitas dan wilayah. Model diplomasi pembangunan ini menjadi instrumen penting bagi Indonesia dalam memperkuat posisi diplomatiknya di kawasan sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah. IMT-GT juga terbukti menjadi sarana pemulihan ekonomi pasca-pandemi melalui peningkatan perdagangan lintas batas, kolaborasi investasi, dan penguatan pariwisata halal (Sudirman et al., 2023). Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2025 IMT-GT memperluas agenda kerjanya ke sektor energi terbarukan, industri halal lintas negara, dan digitalisasi perdagangan (Saputri & Permadi, 2025). Selain itu, keterlibatan sektor swasta serta partisipasi masyarakat semakin menguat melalui program *Local Government Network* (LGN) dan *University Network* (UNINET) yang menghubungkan pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha dalam satu ekosistem kolaboratif.

Meski demikian, keberhasilan IMT-GT tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang signifikan. Ketimpangan infrastruktur antarwilayah, keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM, serta perbedaan kebijakan ekonomi nasional menjadi hambatan utama dalam mewujudkan integrasi program (Permana & Millinia, 2025). Selain itu, beberapa koridor ekonomi seperti Dumai-Melaka dan Songkhla-Medan yang masih tertinggal dibandingkan koridor ekonomi lain di Asia Tenggara seperti *East-West Economic Corridor* di bawah kerangka Greater Mekong Subregion (Aggarwal, 2022). Dalam konteks geopolitik kawasan, IMT-GT juga menjadi arena diplomasi pembangunan yang menonjolkan soft power regionalism ASEAN, di mana negara-negara anggota memanfaatkan kerja sama ini untuk memperkuat ekonomi domestik sekaligus memperlihatkan kepemimpinan regional. Indonesia menggunakan IMT-GT sebagai platform diplomasi ekonomi yang menekankan pembangunan inklusif dan keberlanjutan lingkungan. Sebaliknya, Thailand mengarahkan kebijakannya untuk menghubungkan IMT-GT dengan proyek *Eastern Economic Corridor* (EEC), sebagai bagian dari

strategi industrialisasi dan transformasi digital nasional (Tontisirin & Anantsuksomsri, 2021).

Mengingat berbagai dinamika tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis diplomasi pembangunan sub-regional melalui IMT-GT sebagai instrumen untuk membangun konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan tinjauan literatur, terdapat research gap berupa minimnya kajian yang mengevaluasi efektivitas diplomasi pembangunan IMT-GT hingga tahun 2025, khususnya dalam kaitannya dengan integrasi digital, keberlanjutan, dan sinergi kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Berangkat dari gap tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan utama tentang bagaimana diplomasi pembangunan dalam kerangka IMT-GT berkontribusi terhadap penguatan konektivitas dan pemerataan pertumbuhan daerah hingga tahun 2025 dan tantangan apa saja yang dihadapi untuk menjaga keberlanjutan kerja sama ini di masa depan.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya mengenai diplomasi pembangunan sub-regional yang melibatkan aktor lintas negara dan lintas tingkat pemerintahan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia dan negara mitra IMT-GT untuk memperkuat sinergi kebijakan, memperluas konektivitas ekonomi lintas batas, dan mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak melakukan observasi lapangan secara langsung, melainkan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan tema diplomasi pembangunan sub-regional dan kerja sama IMT-GT. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara mendalam melalui analisis terhadap data yang bersumber dari dokumen, literatur akademik, dan hasil penelitian sebelumnya (Creswell & Poth, 2018). Data dalam penelitian ini bersumber dari referensi ilmiah yang terdiri atas jurnal nasional terakreditasi, laporan Asian Development Bank (ADB), dokumen pemerintah, serta disertasi yang relevan dengan tema IMT-GT. Seluruh sumber yang digunakan merupakan publikasi akademik terkini yang membahas dinamika, kebijakan, dan strategi pembangunan sub-regional di kawasan Asia Tenggara.

Peneliti menerapkan prosedur seleksi literatur secara sistematis untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan valid dan memiliki kedekatan substansial dengan fokus penelitian. Penelusuran sumber dilakukan pada database

jurnal terindeks, prosiding ilmiah, dan laporan kebijakan resmi. Kriteria inklusi yang digunakan meliputi: topik literatur harus berhubungan langsung dengan diplomasi pembangunan, integrasi ekonomi, dan implementasi kerja sama IMT-GT; jenis publikasi terverifikasi secara akademik; serta rentang tahun terbit mayoritas berada dalam sepuluh tahun terakhir agar analisis mencerminkan konteks terbaru hingga tahun 2025. Adapun literatur yang bersifat opini, tidak memiliki dasar akademik kuat, atau tidak memberikan kontribusi empiris terhadap pembahasan dikecualikan dari penelitian ini.

Literatur yang telah terpilih kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi tematik (*thematic content analysis*) untuk mengidentifikasi pola, isu utama, dan tren kebijakan yang muncul dalam implementasi IMT-GT. Analisis dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu: (1) reduksi data dengan memilah informasi yang relevan dari setiap sumber; (2) penyajian data dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema seperti konektivitas fisik dan digital, diplomasi ekonomi dan sosial-budaya, pemberdayaan ekonomi lokal, serta agenda pembangunan berkelanjutan; dan (3) penarikan kesimpulan secara interpretatif dengan mengaitkan temuan literatur pada kerangka teori diplomasi pembangunan dan perspektif sub-regionalisme.

Pendekatan ini membantu peneliti menyusun pemahaman yang lebih menyeluruh tentang peran IMT-GT sebagai bentuk diplomasi pembangunan di tingkat sub-regional, serta melihat bagaimana kerja sama tersebut berperan dalam meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan wilayah di Asia Tenggara.

Hasil dan pembahasan

Sejak dibentuk pada tahun 1993, *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle* (IMT-GT) telah berkembang menjadi salah satu model kerja sama sub-regional di Asia Tenggara yang menggabungkan kepentingan pembangunan ekonomi dengan diplomasi antarnegara. Namun, perkembangan ini tidak hanya menunjukkan ekspansi proyek, tetapi juga perubahan karakter diplomasi pembangunan yang semakin melibatkan berbagai aktor lintas negara. IMT-GT berfungsi sebagai instrumen diplomasi pembangunan (*development diplomacy*) yang menghubungkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga akademik, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam perencanaan pembangunan lintas negara (Sudirman et al., 2023). Dengan demikian, efektivitas IMT-GT tidak semata bergantung pada jumlah proyek yang berjalan, tetapi pada sejauh mana kerja sama ini mampu mengurangi ketimpangan regional, memperkuat konektivitas, dan menghasilkan nilai tambah yang merata di kawasan.

Diplomasi pembangunan dalam IMT-GT bersifat pragmatic diplomacy, berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat ketimbang isu politik tinggi

(*high politics*). Indonesia, Malaysia, dan Thailand memanfaatkan IMT-GT sebagai sarana untuk memperkuat soft power ekonomi dan budaya mereka. Indonesia berfokus pada pembangunan inklusif di wilayah tertinggal Sumatra, Malaysia menonjolkan perluasan investasi dan industri halal, sementara Thailand memprioritaskan konektivitas logistik dan integrasi industri di wilayah selatan (Tangtrongjita, 2023). Perkembangan ini menunjukkan pergeseran diplomasi dari level negara menuju pola yang lebih partisipatif dan responsif. Keterlibatan pemerintah daerah melalui *Local Government Network* (LGN) dan universitas melalui *University Network* (UNINET) memperluas peran aktor non-negara, sehingga diplomasi pembangunan tidak lagi bersifat *top-down*, tetapi mengakomodasi kebutuhan lokal dan dinamika antarwilayah (Permana & Millinia, 2025).

Namun, secara analitis terdapat persoalan bahwa ekspansi aktor ini tidak selalu diikuti dengan kesetaraan kapasitas antarnegara. Malaysia memiliki konsistensi kebijakan regional yang lebih kuat, sementara Indonesia dan Thailand masih menghadapi variasi kemampuan kelembagaan antarprovinsi. Hal ini membentuk asimetri dalam efektivitas pelaksanaan IMT-GT, yang berdampak pada kesenjangan hasil pembangunan antarwilayah anggota.

1.1 Implementasi IMT-GT di Indonesia: Konektivitas dan Investasi Daerah

Indonesia memegang posisi strategis dalam IMT-GT melalui keterlibatan luas wilayah Sumatra, namun efektivitas diplomasi pembangunannya masih menunjukkan ketimpangan antarprovinsi. Aceh, berkat kedekatan geografis dan budaya dengan Malaysia utara, memiliki kesiapan institusional dan sosial yang lebih tinggi dalam menarik investasi asing (Kartini et al., 2020; Srifauzi & Fazrina, 2023). Sementara itu, banyak daerah lain di Sumatra belum mampu memanfaatkan peluang yang sama. Ketidakseimbangan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan IMT-GT di Indonesia tidak ditentukan oleh desain kerja samanya semata, melainkan sangat dipengaruhi oleh varians kapasitas daerah serta lemahnya harmonisasi kebijakan antartingkat pemerintahan.

Berbagai proyek strategis mulai dari pengembangan pelabuhan Sabang, jalan lintas barat Sumatra, hingga kawasan halal dan pariwisata (Abadi & Megahnanda, 2023). Kondisi ini memang memperkuat fondasi pertumbuhan regional, tetapi belum sepenuhnya mampu mengatasi disparitas intraregional. Inisiatif *digital connectivity* dan *e-commerce corridor* Medan Penang Songkhla (Saputri & Permadi, 2025). menunjukkan orientasi Indonesia menuju diplomasi pembangunan berbasis teknologi, namun efektivitasnya masih terhambat oleh ketimpangan infrastruktur digital serta koordinasi birokratis yang belum konsisten.

Dengan demikian, diplomasi internal khususnya integrasi kebijakan pusat daerah menjadi determinan krusial yang sering kali diabaikan dalam evaluasi IMT-GT.

Sinergi diplomasi ekonomi dan budaya melalui industri halal turut memperluas ruang diplomasi Indonesia (Anantakupa, 2025; Candra et al., 2024). Namun, secara analitis, daya saing halal Indonesia masih berada di bawah Malaysia, sehingga kapasitasnya untuk memanfaatkan sektor ini sebagai instrumen diplomasi ekonomi masih terbatas. Kesenjangan ini menegaskan bahwa untuk memperkuat posisi dalam IMT-GT, Indonesia tidak hanya membutuhkan proyek fisik dan digital, tetapi juga peningkatan kualitas regulasi, kejelasan arah kebijakan, serta pembangunan kapasitas daerah yang lebih sistematis.

1.2 Peran Malaysia: Pusat Pertumbuhan dan Hubungan Ekonomi Regional Terstruktur

Malaysia berperan sebagai *driving force* utama dalam kerja sama IMT-GT, dengan memanfaatkan kawasan *Northern Corridor Economic Region* (NCER) yang mencakup Kedah, Penang, Perlis, dan Perak sebagai episentrum pertumbuhan baru di utara negara tersebut. Pemerintah Malaysia berhasil mengintegrasikan program IMT-GT ke dalam kerangka kebijakan nasional melalui *Eleventh Malaysia Plan* dan *Twelfth Malaysia Plan*, yang menekankan konektivitas lintas batas, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi digital sebagai fondasi utama pembangunan (Tontisirin & Anantsuksomsri, 2021). Integrasi kebijakan ini menunjukkan bahwa Malaysia tidak hanya menjadikan IMT-GT sebagai instrumen pembangunan wilayah, tetapi juga sebagai bagian dari strategi diplomasi ekonomi yang lebih luas untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antara kawasan utara dan wilayah metropolitan seperti Kuala Lumpur serta Selangor.

Secara analitis, efektivitas diplomasi pembangunan Malaysia ditopang oleh tiga elemen utama. Pertama, konsistensi integrasi antara kebijakan nasional dan regional yang memastikan kesinambungan program lintas pemerintahan, sehingga koordinasi antarlembaga berjalan lebih terarah. Kedua, posisi dominan Malaysia dalam industri halal dan rantai pasok logistik regional memberikan *leverage* ekonomi yang besar dalam negosiasi dan implementasi proyek IMT-GT (Aggarwal, 2022). Ketiga, strategi *soft power* melalui pengembangan pariwisata halal serta intensifikasi pertukaran komunitas mampu memperkuat *people-to-people connectivity*, memperluas jejaring sosial-ekonomi, dan meningkatkan legitimasi diplomasi pembangunan di tingkat akar rumput (Rizqiany & Maria, 2021).

Kendati demikian, keberhasilan ini tidak sepenuhnya bebas dari risiko. Ketergantungan pada koridor pertumbuhan utama seperti Penang ataupun Kedah dapat menimbulkan konsentrasi manfaat pada wilayah tertentu, sementara daerah

lain di NCER belum memperoleh proporsi keuntungan yang sebanding. Dengan demikian, tantangan strategis bagi Malaysia ke depan adalah memastikan bahwa keunggulan struktural yang dimilikinya mampu ditransformasikan menjadi pemerataan manfaat pembangunan dalam lingkup IMT-GT.

1.3 Peran Thailand: Integrasi Ekonomi Selatan dan Transformasi Hijau Progresif

Thailand menempatkan IMT-GT sebagai bagian integral dari strategi Thailand 4.0, yaitu kebijakan nasional yang berorientasi pada transformasi menuju ekonomi berbasis inovasi, teknologi tinggi, dan pembangunan hijau. Melalui kebijakan ini, Thailand berupaya menggeser struktur ekonominya dari sektor berbasis sumber daya menuju ekonomi kreatif dan berkelanjutan yang menekankan riset, digitalisasi, serta pengembangan industri ramah lingkungan. Wilayah Thailand Selatan seperti Songkhla, Satun, dan Narathiwat menjadi fokus utama implementasi program IMT-GT karena secara geografis berperan sebagai simpul strategis yang menghubungkan Semenanjung Malaysia dengan Pulau Sumatra (Tangtrongjita, 2023). Pemerintah Thailand memanfaatkan kerja sama ini untuk mempercepat pembangunan Eastern Economic Corridor (EEC) proyek ambisius yang bertujuan menjadikan kawasan timur Thailand sebagai pusat manufaktur berteknologi tinggi dan logistik regional.

Selain memperkuat infrastruktur fisik seperti pelabuhan, bandara, dan jalur transportasi darat menuju wilayah perbatasan, Thailand juga mengembangkan pendekatan diplomasi pembangunan yang bersifat kultural melalui *gastrodiplomacy* dan promosi kuliner halal. Strategi ini tidak hanya memperkenalkan identitas kuliner Thailand kepada dunia, tetapi juga menjadi instrumen untuk mempererat hubungan sosial-ekonomi dengan negara-negara berpenduduk muslim di kawasan Asia Tenggara (Murdhania, 2022). Upaya ini mencerminkan bagaimana diplomasi ekonomi dapat bersinergi dengan diplomasi budaya untuk memperkuat posisi Thailand dalam jejaring kerja sama IMT-GT.

Pada tahun 2025, Thailand bahkan menjadi pelopor dalam penerapan konsep *green corridor* di bawah kerangka IMT-GT, sebuah inisiatif yang berfokus pada penggunaan energi terbarukan, efisiensi logistik, dan pembangunan berkelanjutan di sepanjang jalur ekonomi sub-regional (Permana & Millinia, 2025). Inovasi ini tidak hanya meningkatkan daya saing ekonomi kawasan, tetapi juga menegaskan komitmen Thailand terhadap transisi energi bersih dan ekonomi rendah karbon. Keberhasilan ini memperlihatkan bahwa diplomasi pembangunan dalam IMT-GT bukan semata-mata berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menjadi refleksi dari komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, inklusivitas sosial, serta integrasi kawasan yang lebih hijau dan resilien terhadap tantangan global di masa depan.

1.4 IMT-GT Tahun 2025: Transformasi Digital dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan

Memasuki tahun 2025, Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) berada pada fase baru transformasi diplomasi pembangunan sub-regional. Integrasi digital, perluasan rantai pasok hijau, dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal menandai perubahan orientasi kerja sama menuju paradigma pembangunan berbasis inovasi dan keberlanjutan. Sejumlah proyek unggulan seperti *Smart Logistics Corridor*, *Halal Superhighway*, dan *Digital Business Platform* mulai dioperasikan pada koridor strategis seperti Medan-Penang-Songkhla dan Dumai-Melaka-Satun (Srifauzi & Fazrina, 2023). Meski secara normatif menegaskan komitmen ketiga negara terhadap integrasi ekonomi, efektivitas implementasi berbagai inisiatif ini masih bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, koordinasi lintas lembaga, dan kemampuan daerah dalam mengadopsi teknologi baru.

Dalam lingkup diplomasi pembangunan, konektivitas digital telah menjadi elemen strategis IMT-GT 2025. Namun demikian, terdapat kesenjangan adopsi digital antara pusat pertumbuhan dan wilayah perbatasan yang membuat manfaat diplomasi digital belum dirasakan secara merata. Meskipun program UNINET berhasil memperluas kolaborasi pengetahuan di tingkat akademik, transfer pengetahuan tersebut belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan industri dan pemerintah daerah (Viphindrartin & Bawono, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa knowledge-based development diplomacy yang dipromosikan IMT-GT masih menghadapi kesenjangan antara produksi pengetahuan dan pemanfaatannya. Dengan demikian, efektivitas diplomasi berbasis inovasi di kawasan ini masih terbatas oleh perbedaan kapasitas kelembagaan antarwilayah.

Komitmen IMT-GT terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) tercermin dalam pengembangan proyek ekonomi hijau seperti *Green Economic Corridor* dan *Renewable Energy Partnership* (Tamrin et al., 2024). Namun, analisis lebih kritis menunjukkan bahwa sebagian besar proyek hijau masih berada pada tahap pilot dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam rantai pasok regional. Hal ini membuat dampak ekologis dan ekonomi dari diplomasi hijau IMT-GT belum dapat dikategorikan sebagai transformasional. Selain itu, implementasi pembangunan hijau menghadapi hambatan berupa ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah dan belum memadainya kerangka insentif bagi sektor swasta. Dengan demikian, diplomasi pembangunan berbasis keberlanjutan di IMT-GT dapat dikatakan progresif secara normatif, tetapi masih lemah dalam aspek operasional.

1.5 Tantangan dan Prospek ke Depan: Pandangan Evaluatif

Meskipun IMT-GT telah mencatat berbagai kemajuan, efektivitas diplomasi pembangunannya masih dibatasi oleh sejumlah tantangan struktural. Pertama, disparitas pembangunan antarwilayah tetap signifikan. Perbedaan antara koridor inti (Medan-Penang-Songkhla) dan wilayah hinterland menciptakan *asymmetric development gains* yang berpotensi memperlebar ketimpangan sosial-ekonomi. Kedua, koordinasi lintas lembaga dan lintas negara masih terkendala birokrasi, tumpang tindih kewenangan, dan perbedaan *policy priorities*. Hambatan ini menunjukkan bahwa diplomasi pembangunan IMT-GT belum sepenuhnya ditopang oleh tata kelola regional yang koheren. Ketiga, dukungan pembiayaan dari sektor swasta belum optimal, terutama untuk proyek skala kecil dan menengah (Riawan & Akbar, 2024). Kondisi ini memperlihatkan adanya *financing gap* yang menghambat kemampuan IMT-GT untuk mengembangkan proyek berbasis komunitas, padahal proyek semacam itu merupakan inti dari diplomasi pembangunan yang inklusif. Selain itu, evaluasi kritis menunjukkan bahwa peran negara-negara anggota tidaklah simetris: Malaysia dan Thailand cenderung menjadi motor utama integrasi logistik dan digital, sementara sebagian provinsi di Indonesia masih menghadapi keterbatasan kapasitas institusional dan infrastruktur dasar.

Meskipun berbagai tantangan tersebut signifikan, prospek IMT-GT ke depan tetap positif. Transformasi digital dan ekonomi hijau menawarkan peluang untuk menciptakan model diplomasi pembangunan baru yang lebih adaptif dan efisien. Namun, keberhasilan masa depan IMT-GT sangat bergantung pada tiga faktor: (1) peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, (2) integrasi teknologi yang inklusif, dan (3) konsistensi komitmen politik ketiga negara untuk menjaga *policy coherence*. Jika ketiga aspek ini dipenuhi, IMT-GT berpotensi menjadi model diplomasi pembangunan paling berhasil di Asia Tenggara.

Penelitian ini menegaskan bahwa diplomasi pembangunan sub-regional melalui IMT-GT telah berkontribusi signifikan dalam memperkuat konektivitas dan kerja sama ekonomi kawasan. Namun, efektivitas diplomasi IMT-GT tidak merata. Indonesia, Malaysia, dan Thailand memanfaatkan IMT-GT dengan strategi yang berbeda, mencerminkan kepentingan domestik dan kapasitas kelembagaan masing-masing. Temuan penelitian menunjukkan bahwa IMT-GT berhasil membangun platform kerja sama yang inklusif dan multi-aktor melalui LGN dan UNINET. Namun, diplomasi ini masih menghadapi keterbatasan berupa ketimpangan infrastruktur, perbedaan kebijakan ekonomi, dan minimnya insentif bagi sektor swasta.

Dengan demikian, diplomasi pembangunan dalam IMT-GT dapat dikategorikan sebagai "efektif secara parsial" kuat dalam aspek normatif dan kelembagaan, tetapi masih lemah pada implementasi teknis dan distribusi manfaat. Keberhasilan penuh IMT-GT akan sangat ditentukan oleh kemampuan tiga negara untuk menyelaraskan kebijakan, memperkuat kapasitas daerah, dan memperluas pembiayaan pembangunan. Jika langkah ini tercapai, IMT-GT dapat menjadi contoh model diplomasi pembangunan sub-regional yang efektif dan berkelanjutan di Asia Tenggara.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa diplomasi pembangunan sub-regional melalui Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) telah menjadi instrumen strategis dalam memperkuat konektivitas kawasan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan memperdalam kerja sama lintas batas di Asia Tenggara. IMT-GT tidak hanya berfungsi sebagai wadah koordinasi ekonomi, tetapi juga sebagai platform diplomasi pembangunan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, dan kelembagaan dalam satu kerangka pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Di Indonesia, diplomasi pembangunan diwujudkan melalui penguatan infrastruktur konektivitas di wilayah Sumatra, digitalisasi ekonomi daerah, serta pemberdayaan masyarakat lokal dalam rantai pasok lintas batas. Malaysia, di sisi lain, memanfaatkan IMT-GT sebagai sarana untuk memperkuat posisinya sebagai pusat logistik, perdagangan, dan industri halal di Asia Tenggara, serta sebagai bagian dari strategi nasional *Twelfth Malaysia Plan*. Sementara itu, Thailand menjadikan IMT-GT sebagai instrumen untuk mendorong transformasi ekonomi hijau dan pengembangan kawasan selatan melalui kebijakan *Thailand 4.0*, dengan menitikberatkan pada inovasi, energi terbarukan, dan pembangunan berkelanjutan. Ketiga negara tersebut memperlihatkan bahwa diplomasi pembangunan dalam IMT-GT tidak bersifat top-down, melainkan berbasis kolaborasi dan responsif terhadap kebutuhan nyata di tingkat lokal.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa IMT-GT bukan semata forum ekonomi, melainkan model diplomasi pembangunan modern yang menekankan sinergi antara aktor negara dan non-negara. Keterlibatan Local Government Network (LGN) dan University Network (UNINET) menjadi bukti konkret bahwa kerja sama ini bergerak menuju paradigma *bottom-up diplomacy*, di mana pemerintah daerah, lembaga akademik, dan sektor swasta memiliki peran signifikan dalam perencanaan, implementasi, dan monitoring pembangunan sub-regional. Model ini memperkuat gagasan bahwa diplomasi pembangunan yang

efektif harus bersifat partisipatif, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan global seperti digitalisasi, ekonomi hijau, dan tantangan iklim.

Tantangan struktural masih menjadi hambatan utama bagi keberlanjutan kerja sama IMT-GT. Ketimpangan infrastruktur antarwilayah, perbedaan kebijakan ekonomi nasional, serta keterbatasan dukungan finansial dari sektor swasta dan lembaga internasional perlu segera diatasi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan penyelarasan kebijakan (*policy coherence*) antarnegara anggota. Selain itu, penguatan mekanisme evaluasi berbasis data dan perluasan kemitraan dengan lembaga pembangunan global seperti Asian Development Bank (ADB) dan UNDP akan menjadi langkah penting dalam memperkuat efektivitas diplomasi pembangunan di bawah IMT-GT. Ke depan, IMT-GT memiliki prospek strategis untuk menjadi model *development diplomacy* yang sukses di Asia Tenggara, dengan memanfaatkan potensi integrasi digital, penerapan ekonomi hijau, serta komitmen bersama terhadap pembangunan berkelanjutan. Melalui sinergi kebijakan, inovasi kelembagaan, dan penguatan jejaring lintas aktor, IMT-GT dapat menjadi motor utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata, meningkatkan daya saing regional, dan memperkuat stabilitas sosial kawasan. Dengan demikian, diplomasi pembangunan sub-regional di bawah IMT-GT tidak hanya berperan sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai pilar penting bagi pembentukan komunitas Asia Tenggara yang terintegrasi, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Saran

Untuk dapat lebih terstruktur lagi, perlu dilakukan sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah melalui koordinasi yang solid serta optimalisasi peran *Local Government Network (LGN)* dan *University Network (UNINET)* sebagai penghubung strategis antara pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan lintas batas berjalan selaras dan berorientasi pada hasil yang berkelanjutan. Fokus kerja sama IMT-GT perlu diarahkan pada pembangunan infrastruktur lintas batas yang terintegrasi, percepatan transformasi digital untuk memperkuat efisiensi ekonomi, serta peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM sebagai penggerak utama pertumbuhan lokal. Pengembangan industri halal, pariwisata berkelanjutan, dan penerapan ekonomi hijau serta energi terbarukan menjadi langkah strategis untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

IMT-GT juga harus berfungsi sebagai sarana *soft power* regional yang mengedepankan kolaborasi ekonomi, sosial, dan budaya yang saling menguntungkan, sehingga mampu memperkuat integrasi dan ketahanan kawasan Asia Tenggara di tingkat global.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Elly Nurlia, S.IP., M.Si., selaku dosen pengampu mata kuliah Pemerintahan Asia Tenggara, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta kesempatan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan tugas Ujian Tengah Semester ini. Melalui mata kuliah ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika pemerintahan dan kerja sama kawasan di Asia Tenggara. Semoga tugas ini dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran yang bermanfaat dan menambah wawasan akademik penulis.

Daftar Pustaka

- Abadi, P. S., & Megahnanda, A. K. (2023). Implementasi Program Kerjasama Thailand Di Bidang Pariwisata Melalui Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (Imt-Gt) Tahun 2017-2021. *Journal Publicuho*, 6(2), 629–648. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.184>
- Aggarwal, A. (2022, February). Special Economic Zones in the Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle. <https://doi.org/10.22617/TCS210449-2>
- Anantakupa, A. G. (2025). Contribution Of Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (Imt-Gt) To Improve Halal Food In Thailand. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(2), 1158–1166. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i2.572>
- Candra, R., Maulida, S., & Sativa Anjani, R. (2024). Halal Industry Development In Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (Imt-Gt): An Analysis Of Islamic Diplomacy In Enhacing Regional Cooperation And Economic Development. *Proceedings of International Conference on Islamic Civilization and Humanities*, 2, 234–249. <https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/iconfahum/article/view/1807>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th Edition). SAGE Publications. https://books.google.co.id/books/about/Qualitative_Inquiry_and_Research_Design.html?hl=id&id=gX1ZDwAAQBAJ&redir_esc=y
- Effendi, S., Aisyah, S. M., Supli, N. A., & Soraida, S. (2024). Implikasi Kerjasama Sub Regional ASEAN IMT-GT dalam Pengembangan Pariwisata di Sumatera Selatan. *Jurnal Hubungan Internasional*, 17(1), 135–156. <https://doi.org/10.20473/jhi.v17i1.50962>
- Farid, M., Nuzullah, T. M. F., Aklya, Z., Nazila, S., Ulhaq, M. Z., Apriliansyah, F., & Sasmita, N. R. (2025). Optimizing Energy Consumption Prediction Across the IMT-GT Region Through PCA-Based Modeling. *Infolitika Journal of Data Science*, 3(1), 31–39. <https://doi.org/10.60084/ijds.v3i1.286>
- Kartini, I., Irewati, A., Rahman, A. R., Pudjiastuti, T. N., Luhulima, CPF., Dewi, R., Raharjo, S. N. I., & Nufus, H. (2020). Penguatan Konektivitas Lintas Batas Dalam Kerja Sama Ekonomi Subregional. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(1), 117. <https://doi.org/10.14203/jpp.v17i1.859>

- Murdhania, D. (2022). Analisis implementasi gastrodiplomasi Thailand dalam mempererat hubungan dengan negara muslim dunia menggunakan halal food. *Journal of Halal Industry Studies*, 1(2), 91–100. <https://doi.org/10.53088/jhis.v1i2.561>
- Pahlawan, H. F. (2025). Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Kerangka Kebijakan Lingkungan ASEAN. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 7(1), 134–146. <https://doi.org/10.24198/padjir.v6i2.55837>
- Permana, A., & Millinia, K. (2025). Regional Synergies: South Sumatra's Strategy for Sustainable Connectivity in the Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (pp. 913–926). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-366-5_92
- Putri, R. A. (2025). Konektivitas Subregional IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand-Growth Triangle) Di Wilayah Perbatasan Kepulauan Riau. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 17(2), 85–111. <https://doi.org/10.31315/jsdk.v17i2.12463>
- Rakhmadi, R., Hutagalung, S. S., & Nizar, M. (2025). Comparision of IMT GT: Study Case of Malaysia-Thailand and Indonesia. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 6(7), 1770–1780. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss7pp1770-1780>
- Riawan, W., & Akbar. (2024). Transformasi Ekonomi Daerah Kepulauan Riau yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Triple Konsep: Pariwisata, Ekonomi Biru, dan Kerjasama Internasional Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle (IMT-GT). *Jurnal Archipelago*, 3(01), 29–40. <https://doi.org/10.69853/ja.v3i01.92>
- Rizqiany, B., & Maria, D. (2021). Program Kerjasama Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle Terkait Perkembangan Wisata Halal Di Indonesia Periode 2017-2018. (*Mjir*) *Moestopo Journal International Relations*, 1(2), 137–148. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/mjir/article/view/1488/776>
- Rokhaniyah, H. R., & Almeida, D. K. (2023). Strategi Diplomasi Publik Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (Imt-Gt) Dalam Meningkatkan Sektor Pariwisata Halal Di Asia Tenggara. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(2), 344. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.344-355>
- Saputri, N. A., & Permadi, A. (2025). Enhancing Indonesia's Foreign Exchange Earnings Through Collaborative Efforts In The Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (Imt-Gt) Initiative. *Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies*, 3, 14–40. <https://jurnal.fisip.budiluhur.ac.id/jsgs/article/view/43/27>
- Srifauzi, A., & Fazrina, S. (2023). Peluang Dan Tantangan Aceh Pada Forum Kerjasama Imt-Gt (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) Dalam Peningkatan Investasi Asing. *Jurnal PIR : Power in International Relations*, 8(1), 68–79. <https://doi.org/10.22303/pir.v8i1.6>
- Sudirman, A., Dermawan, W., & Gumilar, S. (2023). Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan Kerjasama Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

- Covid-19. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10, 51–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.56015/gjikplp.v10i2.120>
- Tamrin, M. H., Lubis, L., & Musleh, Moh. (2024). Sustainable governance practices for ecotourism: engaging local communities in the Golden Triangle Island, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2), 377–398. <https://doi.org/10.26618/ojip.v14i2.12440>
- Tangtrongjita, P. (2023). Review and Assessment of the Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle Economic Corridors: Thailand Country Report. Asian Development Bank. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22617/TCS220440-2>
- Tontisirin, N., & Anantsuksomsri, S. (2021). Economic Development Policies and Land Use Changes in Thailand: From the Eastern Seaboard to the Eastern Economic Corridor. *Sustainability*, 13(11), 6153. <https://doi.org/10.3390/su13116153>
- Usman, M., Ratih, A., Wahyudi, H., & Tama, M. J. (2024). Testing Causality Models in the Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT). *Proceedings of the 7th International Conference of Economics, Business, and Entrepreneurship, ICEBE 2024, 4-5 September 2024, Shah Alam, Selangor, Malaysia*. <https://doi.org/10.4108/eai.4-9-2024.2353763>
- Viphindrartin, S., & Bawono, S. (2023). Tamansiswa Management Journal International Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Vector Analysis. *Tamansiswa Management Journal International*, 9(1), 69–77. <https://doi.org/10.54204/TMJI/Vol9I2023008>
- Yolin, T. K., & Rantepadang, F. N. (2024). Meninjau Keuntungan dan Tantangan Indonesia selaku Ketua ASEAN Summit 2023 atas Kerja Sama IMT-GT dalam Kaitan BRI (Belt and Road Initiative). *Jurnal Sentris*, 4(2), 162–176. <https://doi.org/10.26593/sentris.v4i2.7130.162-176>